



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : DINAS KETAHANAN PANGAN  
**SUB UNIT KERJA** : DINAS KETAHANAN PANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AMIR HASBI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 179427

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 795.918.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 818 m2/144 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 281.866.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000
3. Tanah Seluas 1473 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 14.700.000
4. Tanah Seluas 182 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 6.552.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/40 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 88.200.000
6. Tanah Seluas 725 m2 di BATANG HARI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 36.100.000
7. Tanah Seluas 250 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/28 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/96 m2 di JENDERAL SUDIRMAN RT. 25 RW. 04 Kode Pos. 36613, [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 224.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	240.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.953.985
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.370.871.985
III. HUTANG	Rp.	200.930.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.169.941.185

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.